

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

1. Peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa Bube belum terlalu optimal optimal hal tersebut dapat terlihat dari partisipasi masyarakat yang masih kurang serta jumlah penduduk miskin yang lebih dari 100 orang dapat diketahui bahwa peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat belum optimal karena masyarakat dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat ini masyarakat desa belum berdaya hal tersebut terlihat dari partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang masih kurang serta jumlah masyarakat miskin yang mencapai 17% sehingga diperlukan lagi peran pemerintah desa yang lebih optimal demi mencapai pemberdayaan masyarakat yang lebih baik. Tetapi jika dilihat dari memfasilitasi dan menginovasikan program pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik tetapi dalam hal partisipasi masyarakat masih kurang.
2. Faktor utama dari kurangnya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Bube ini adalah partisipasi masyarakat terhadap pentingnya berperan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Dan juga salah satu hal yang perlu diperhatikan yaitu pemahaman masyarakat terhadap segala bentuk program pemberdayaan masyarakat, sehingganya jika masyarakat masyarakat memahami lebih

dalam apa itu pemberdayaan masyarakat akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat .

3. Dalam mengupayakan pemberdayaan masyarakat, pemerintah desa sudah mengupayakan agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan baik yaitu diataranya dengan memberikan akses yang baik, control atau pengawasan pada setiap program pemberdayaan yang ada didesa serta berupaya memberikan mamfaat untuk masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, tetapi yang menjadi permasalahan adalah partisipasi masyarakat yang mash kurang sehingganya peran pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat masih belum optimal dikarenakan partisipasi masyarakat yang masih kurang dengan upaya pemerintah desa dalam meningkatkan partisiapasi masyarakat ini bisa terlaksana dengan baik.

## **5.2 Saran**

1. Dalam peran pemberdayaan masyarakat ini haruslah pemerintah desa lebih meningkatkan lagi perannya sebagai fasilitator, motivator dan innovator sehingga mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya program pemberdayaan masyarakat dan kedepannya masyarakat dapat berpartisipasi dengan aktif dalam setiap program pemberdayaan masyarakat.

2. Agar kendala atau faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan masyarakat dapat teratasi sebaiknya antara pemerintah desa dan masyarakat haruslah sama-sama sadar akan pentingnya pemberdayaan masyarakat di suatu desa, sehingga ketika kesadaran peserta semangat ada maka kerjasama dan partisipasi aktif dari pemerintah desa dan masyarakatpun dapat terjalin dengan baik.
3. Dalam memberdayakan masyarakat maka upaya besar yang sebaiknya dilakukan oleh pemerintah desa adalah selalu menjaga agar pemberdayaan masyarakat berjalan dengan baik dengan cara mengontrol atau mengawasi apakah pemberdayaan masyarakat ini telah berjalan dengan baik serta selalu menjaga agar partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan sehingga pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan . 2015 . *dalam buku: Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa* . 2015
- Bennis, Katz, & Kahn, 1980
- Bahri. 2016 . *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep dan Aplikasi*, 2013, hal. 30-33); (Ariani, 2016, hal. 279-280
- Durianto , Robert . 2013, hal. 24) Subejo dan Narimo dalam *Mardikanto dan Soebiato* (2012, h.31)
- Febriyanti , Suci dkk. 2020 . *Jurnal Eksplorasi Akutansi* Vol 2, No 1 , Seri C, Februari 2020, Hal 2331-2347
- Ginjar , Kartasasmita . 1995. *Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Administrasi Pada Fakultas Ilmu Administrasi*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Hulu , Yamulia dkk. 2018 . *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* . 10(1) (2018):146-154
- HAW , Widjaja . 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idrus (2007:34)
- Miles dan Huberman (Hasan 1992:16)
- Nations , United . 2006. 956, h.83-92 dalam *Tampubolon, 2006 Jurnal Administrasi Publik (JAP) VOL 1, No 5*
- Noor , Munawar . 2011. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, Volume I, No 2, Juli 2011
- Prijono dan Pranaka. 1996 . *Teori pada buku yang di terbitkan oleh pada tahun 1996*
- Robbins & Judge, 2008:372
- Rudito , B , dan M. Famiola. 2013 , *Social Mapping-Metode Pemetaan Sosial: Teknik Memahami Suatu Masyarakat atau Komuniti*, Rekayasa Sains, Bandung, 2013,hlm, 125-126
- Sutrisno, 2005:18 *dalam Jurnal Administrasi Publik (JAP) VOL 1, No 5*

Suhendra . 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung:  
Alfabeta.